

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun, masalah pengangguran dan kemiskinan, pendidikan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi warna dalam kehidupan bangsa dan negara sampai saat ini. Kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan belum terwujud, tidak hanya peranan negara untuk melakukan pembangunan nasional demi mencapai cita-cita bangsa. Dalam hakikatnya, pembangunan nasional muncul dari dilakukan oleh dan untuk rakyat dalam seluruh aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan keadilan.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk memakmurkan kehidupan bangsa dan negaranya serta mewujudkan masyarakat yang adil. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia harus melibatkan berbagai macam aspek kehidupan salah satu sasaran utamanya yaitu berupa pemulihan ekonomi. Bidang ekonomi merupakan bidang penggerak utama dalam pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan di dorong secara saling memperkuat, saling terikat, dan terpadu dengan pembangunan lainnya selaras dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, jika bertitik tolak dengan pembangunan tersebut, maka

pemerintah dan warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, membina dan mengelola potensi masyarakat.

Kemajuan ekonomi nasional akan tercapai jika tingkat provinsi memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemudian, kemajuan ekonomi ditingkat kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang dari ekonomi desa yang kuat yang berimbans pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Akuntansi memiliki peranan yang dominan di dalam berjalannya kinerja suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. Menurut Irfani dan Dahria (2009) dalam perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, dianalisis dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Di dalam organisasi nirlaba juga membutuhkan akuntansi, walaupun organisasi nirlaba tidak memerlukan laba namun sistem akuntansi digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, membayar karyawan serta membayar beban-beban yang lainnya. Di desa pun juga dibutuhkan suatu akuntansi yang sesuai bagi kegiatan perekonomian desa karena desa merupakan tempat penunjang ekonomi dengan segala hasil-hasil yang dimiliki. Menurut Bapemas (2014), di desa terdapat BUMDesa yang dapat membantu menunjang

perekonomian masyarakat di desa. Di dalam BUMDesa pun, akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu kinerjanya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Pembangunan desa bertujuan untuk membangun ekonomi yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat, dan kualitas hidup serta mengurangi jumlah penduduk miskin dan retan, dan melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan retan melalui pemenuhan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walau dalam batasan otonomi asli desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk) sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial. Desa juga diberikan kewenangan untuk meningkatkan kapasitas finansial desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga desa dapat menggunakan kemampuannya untuk mengatur, dan mengatur kepentingan masyarakat secara efektif sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Akan tetapi, perlu disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. pembangunan pada

tingkat desa antara lain disebabkan karena persoalan keuangan (Sakdiah et al., 2018). Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dalam hal ini melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa berhak membangun lembaga yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli desa, lembaga tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, salah satu tujuan pendirian BUMDesa adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam BUMDesa dibutuhkan sistem akuntansi untuk pencatatan laporan keuangan agar laporan yang dibuat dapat akurat dan meminimalisir adanya kecurangan. Sistem pencatatan laporan keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan BUMDesa dalam menata dan menyusun laporan keuangannya, sebab tidak semua pelaksanaan BUMDesa mengerti dengan baik akuntansi secara operasional dan berlaku umum terutama masyarakat di desa. Oleh karena itu, pentingnya akuntansi di dalam suatu organisasi terutama organisasi yang menghasilkan laba untuk dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya terutama di dalam BUMDesa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan

ekonomi desa. BUMDesa dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberi sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Dalam pengelolaan BUMDesa diperlukan idealisme yang kuat dari pengurus BUMDesa agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat sasaran, pengelolaan BUMDesa harus dijalankan dengan prinsip-prinsip BUMDesa diantaranya yaitu *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable dan sustainable*. Tujuan utama BUMDesa antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa tersebut dapat diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sehingga setiap pemerintah desa dapat mendorong dan memberikan dukungan dalam pendirian BUMDesa tersebut.

Keberadaan BUMDesa sudah mulai dilirik oleh Pemerintah Daerah seperti salah satunya kabupaten yang berada di berbagai daerah. Namun, keberadaan BUMDesa masih dalam fase merintis dan berkembang. Hal ini disebabkan karena BUMDesa belum dikelolanya secara profesional dan maksimal. Adanya Undang-undang Desa tentunya memberikan peluang agar

desa dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun, keberadaan Desa masih membutuhkan peningkatan pada sumber daya manusia seperti keterampilan, dan keahlian dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Salah satu desa di Kabupaten Sumenep Kecamatan Kalianget yang telah, mendirikan BUMDesa adalah di Desa Pinggir Papas. Dalam hal ini pemerintah desa pinggir papas mengharapkan dengan terbentuknya BUMDesa ini bisa meningkatkan perekonomian di Desa Pinggir Papas dan dapat dikelola secara optimal sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya yang di maksud, selain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang merupakan gambaran potensi keuangan desa pada umumnya mengandalkan unsur pajak desa dan retribusi desa. Berkaitan dengan sektor retribusi, maka desa dapat menggali potensi sumber daya yang ada. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) secara efektif dan efisien perlu adanya upaya pengelolaan kinerja BUMDesa dengan baik untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.

Desa Pinggir Papas rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani garam. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian desa, desa Pinggir Papas membentuk BUMDesa pada tahun 2019 yang diberi nama “BUMDesa Mutiara Bumi”. Namun BUMDesa ini baru beroperasi pada awal tahun 2020 dan

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Awal pembentukan BUMDesa, BUMDesa menerima modal dari desa sebesar Rp. 150.000.000 untuk pembangunan BUMDesa dan sebagai modal untuk membangun unit usaha. BUMDesa Mutiara Bumi memiliki lima unit usaha diantaranya yaitu, Agen Sembako, Investasi Tambak Garam, Penyediaan Wi-Fi, Jasa Token Listrik dan pulsa, dan Warung Kopi.

Akan tetapi, pada tahun 2020 BUMDesa Mutiara Bumi belum bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa Pinggir Papas dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 BUMDesa mengalami kerugian dan beberapa unit usaha ditutup. Salah satu usaha yang mengalami kerugian dan ditutup yaitu usaha jasa token listrik dan pulsa, alasan usaha ini ditutup yaitu karena munculnya beberapa pesaing yang menjual pengisian token listrik dan pulsa di desa Pinggir Papas. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan yang diperoleh usaha ini mengalami penurunan, sedangkan usaha tersebut tetap berkewajiban untuk membayar gaji karyawan setiap bulannya sehingga menyebabkan kerugian pada usaha token listrik dan pulsa.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romaiki Hafni, Affan, dan M. Naulul Hakiki (2021) bahwa BUMDes Sataretanan belum memenuhi semua indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sehingga BUMDes ini dikatakan belum efektif. Salah satu indikator efektivitas tersebut yang dapat dipenuhi yaitu indikator integrasi dimana BUMDes Sataretanan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan melalui setiap kepala dusun.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS BUMDesa MUTIARA BUMI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PINGGIR PAPAS KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas BUMDesa Mutiara Bumi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisa Efektivitas BUMDesa Mutiara Bumi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi yang berkaitan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2. Manfaat Praktis

1) Manfaat penelitian bagi BUMDesa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kemajuan BUMDesa kedepannya.

2) Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan penelitian selanjutnya.

1.5 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BUMDesa Mutiara Bumi yang berlokasi di perbatasan desa Pinggir Papas dan Karang Anyar tepatnya di Jl. Raya Pinggir Papas No. 1 Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian ini untuk menganalisa efektivitas BUMDesa Mutiara Bumi dalam meningkatkan pendapatan asli desa berdasarkan indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta prinsip pengelolaan BUMDesa seperti *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*.